

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Strategi JRMK dalam memperjuangkan hak warga Kampung Bayam merupakan bentuk nyata dari praktik advokasi politik akar rumput (*grassroots political advocacy*). JRMK mengadopsi pendekatan terstruktur melalui tiga pilar utama: pengorganisasian, advokasi kebijakan, dan pembangunan jejaring. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk edukasi hak-hak warga, aksi demonstrasi, lobby ke pemerintah, negosiasi, gugatan hukum (yang sempat dirancang), serta kolaborasi dengan akademisi, LBH, dan komunitas dampingan lainnya.

Strategi JRMK menunjukkan upaya kolektif warga dalam menegosiasikan hak-haknya di tengah dominasi kebijakan pembangunan yang eksklusif. Model kontrak politik dengan Gubernur Anies Baswedan serta penolakan atas skema sewa dari Jakpro menjadi bentuk politik kewargaan (*citizenship politics*), di mana warga miskin kota tidak lagi menjadi objek pembangunan, tetapi menuntut peran sebagai subjek dan pemilik hak atas ruang hidupnya. Dalam konteks teori kelompok kepentingan, JRMK berperan sebagai *interest group non-konvensional*, yang tidak mengandalkan kekuatan modal atau politik formal, tetapi bertumpu pada kekuatan komunitas dan solidaritas horizontal.

Perjuangan JRMK menghadapi berbagai kendala struktural, sosial, dan psikologis, yang secara langsung melemahkan efektivitas strategi. Hambatan struktural mencakup birokrasi yang tertutup, inkonsistensi kebijakan pasca-pergantian pemimpin, serta absennya sistem perlindungan jangka panjang bagi warga terdampak penggusuran. Hambatan sosial dan psikologis terlihat dari fragmentasi warga menjadi tiga kubu yang berbeda arah perjuangan, serta kelelahan mental akibat lamanya perjuangan tanpa hasil yang konkret.

Temuan ini memperkuat simpulan dari beberapa penelitian terdahulu bahwa keberhasilan strategi advokasi komunitas miskin kota sangat

dipengaruhi oleh tiga faktor utama: solidaritas internal warga, dukungan politik dari pengambil kebijakan, serta ketersediaan institusi hukum dan sosial yang berpihak. Dibandingkan dengan kasus Kampung Akuarium yang lebih berhasil karena ada dukungan pemerintah secara konsisten, kasus Kampung Bayam justru menampilkan bentuk kerentanan ketika dukungan negara ditarik, dan warga harus berjuang sendiri di tengah fragmentasi sosial.

Penelitian ini menegaskan bahwa strategi advokasi yang dijalankan JRMK di Kampung Bayam merupakan bentuk resistensi dan inovasi politik komunitas, namun masih memerlukan dukungan kebijakan publik yang lebih responsif dan sistemik. Upaya ini merupakan refleksi dari pergeseran diskursus kebijakan publik, dari pendekatan birokratis ke arah ko-produksi kebijakan (policy co-production) yang berpihak pada kelompok marginal dan menjunjung keadilan sosial dalam ruang kota.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, penulis menyusun dua jenis saran: saran praktis yang ditujukan untuk pihak-pihak terkait langsung dengan isu di lapangan, serta saran teoritis untuk pengembangan keilmuan dan penelitian lebih lanjut.

### 5.2.1 Saran Praktis

#### a. Untuk Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK):

1. Memperkuat konsolidasi internal warga dan manajemen konflik.

Fragmentasi warga Kampung Bayam menjadi salah satu kendala utama dalam perjuangan. JRMK perlu membangun forum koordinasi lintas kelompok secara rutin, serta menghadirkan fasilitator komunitas untuk menjembatani ketegangan antarwarga.

2. Mengembangkan sistem komunikasi publik yang lebih efektif dan terstruktur.

Penguatan tim media dan dokumentasi JRMK dapat menjadi alat penting dalam membangun narasi perjuangan ke publik luas, termasuk dalam bentuk kampanye digital, testimoni warga, dan pelaporan berkala atas kondisi terkini.

3. Merancang ulang strategi hukum yang adaptif dan berkelanjutan.

Meskipun sempat ditunda, langkah hukum seperti gugatan ke PTUN tetap perlu dipertimbangkan dengan persiapan matang, termasuk penguatan bukti, dukungan hukum profesional, dan kampanye isu berbasis data.

b. Untuk Pemerintah Daerah dan BUMD Terkait (seperti Jakpro):

1. Mengadopsi prinsip keadilan sosial dan partisipatif dalam kebijakan perumahan.

Pemerintah perlu berkomitmen menjalankan kebijakan berbasis hak, bukan semata logika komersial. Warga korban penggusuran seperti Kampung Bayam seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan hunian layak dengan skema koperasi warga.

2. Menetapkan sistem hukum dan kebijakan yang konsisten lintas periode kepemimpinan.

Agar perjuangan komunitas miskin kota tidak bergantung pada figur gubernur semata, perlu dibentuk sistem perlindungan hak bermukim yang menjadi bagian dari kebijakan kelembagaan tetap (bukan ad hoc atau bersifat politis).

### 5.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan berarti bagi pengembangan diskursus dalam ilmu politik dan kebijakan publik, khususnya pada isu advokasi akar rumput dan hak-hak warga negara dalam konteks urbanisasi. Melalui studi kasus Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan perjuangan warga Kampung Bayam, penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi komunitas miskin kota bukan sekadar bentuk perlawanan terhadap kebijakan

negara, melainkan juga bentuk ekspresi dari politik kewargaan (citizenship politics). Di sini, warga menjadi aktor politik aktif yang memperjuangkan hak atas ruang hidup melalui mekanisme non-negara, seperti koperasi, kampung susun, dan kontrak politik. Temuan ini memperkaya perspektif kebijakan publik dengan menekankan pentingnya pendekatan ko-produksi kebijakan (co-production of policy), di mana warga tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pembuat kebijakan.

Selain itu, penelitian ini menyadari keterbatasannya karena hanya berfokus pada satu studi kasus. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi perbandingan (comparative study) antar kampung dampingan JRMK, seperti Kampung Akuarium, Kampung Kunir, atau Marlina. Dengan pendekatan longitudinal dan multikasus, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas strategi advokasi di berbagai konteks politik dan sosial yang berbeda, serta merumuskan model konseptual advokasi komunitas miskin kota yang lebih komprehensif dan kontekstual di Indonesia.